



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI MALUKU
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2012-2013
TANGGAL 14 – 16 MARET 2013**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 20A ayat (1), DPR RI mempunyai fungsi di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf t maka pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012, Komisi IX DPR RI telah membentuk 2 (dua) Tim Kunjungan Kerja (kunker) Spesifik, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Nanggro Aceh Darulssalam.

Laporan ini berisi kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Maluku tanggal 14 – 16 Maret 2013.

B. DASAR KUNJUNGAN

Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX.
2. Menggali informasi realisasi program yang dibiayai APBN, terkait dengan Bidang kesehatan, khususnya Program Jamkesmas, Jampersal, dan Dana BOK.

3. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Maluku terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan tugas Komisi IX DPR RI.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dilaksanakan dari tanggal 14 – 16 Maret 2013.

E. SUSUNAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Susunan Tim Kunker Komisi IX DPR RI ke Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

NO ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI
342	dr. Ribka Tjiptaning	Ketua Tim	PDIP
490	Siti Mufattah, Psi	Anggota	PD
237	Hj. Endang Agustini Syarwan Hamid, S.IP	Anggota	PG
382	Dra. Sri Rahayu	Anggota	PDIP
48	Ansory Siregar, Lc	Anggota	PKS
136	Hang Ali Syah Pahan, SH	Anggota	PAN

F. KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Direktur RSUD, dan Perwakilan Puskesmas setempat di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. LETAK GEOGRAFIS

Luas wilayah 712.479,65 km², dengan luas daratan 54.185 km², perairan 658.294,69 km², dengan jumlah pulau 1.340 pulau. Batas wilayah, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafuru
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Irian

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi

B. PEREKONOMIAN

Mata pencarian penduduk sebagian besar adalah bercocok tanam. Pada Tahun 2011 panen padi sawah seluas 20.152 ha, sementara luas panen padi ladang 1.075 ha. Sebagian penduduk bergerak di sector perikanan, perdagangan, dan perindustrian.

C. KEPENDUDUKAN

Tahun 2010 sebesar 1.533.506, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.695.055 jiwa.

D. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Provinsi Maluku terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu: Kab. Maluku Tenggara; Kab. Maluku Tenggara Barat; Kab. Maluku Barat Daya; Kota Tual ; Kab. Kep. Aru ; Kab. Maluku Tengah; Kab. Buru; Kab. Buru Selatan; Kab. Seram Bagian Barat; Kab. Seram Bagian Timur ; Kota Ambon.

III. TEMUAN KUNJUNGAN KERJA

1. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan yang disebabkan:
 - a. SDM Kesehatan yang terbatas secara kualitas dan kuantitas
 - b. Sarana prasarana yang kurang memadai
 - c. Transportasi dan informasi yang terbatas
 - d. Kondisi geografis kepulauan
2. Regulasi yang tidak dapat diterapkan secara menyeluruh di daerah-daerah kepulauan.
3. Pembiayaan kesehatan masih kurang.
4. Tindak operasi dilakukan oleh dokter umum, karena dokter spesialis tidak ada yang mau datang ke daerah kepulauan (Kabupaten MTB).
5. Perjalanan dari daerah kepulauan ke rumah sakit rujukan di ibu kota Provinsi membutuhkan biaya jutaan.
6. Sarana prasarana (di Kab. Buru Selatan) rusak berat akibat peristiwa kerusuhan.
7. Untuk memenuhi kebutuhan adanya RSUD, maka puskesmas kabupaten diubah menjadi RSUD walau belum memenuhi standar.

8. Pernah terjadi biaya operasi pasien Jamskesmas selama satu tahun tidak bisa diklaim.
9. Masyarakat kesulitan menjangkau RS, sehingga Kartu Jamkesmas maupun Jampersal tidak terpakai.
10. Adanya keterlambatan dalam mendistribusikan kartu Jamkesmas/Jampersal dari kabupaten/kota ke puskesmas karena proses verifikasi data kepesertaan yang belum selesai; biaya distribusi belum diterima; dan iklim/cuaca yang tidak memungkinkan beberapa kabupaten untuk mendistribusikan sampai ke tingkat puskesmas.
11. Ketersediaan obat generik yang sesuai dengan formularium belum sepenuhnya terpenuhi, terutama obat untuk jantung dan kanker.
12. Dengan mekanisme keuangan daerah, RS yang masih berstatus RSUD (belum menjadi BLUD) menyetor secara bruto dana pelayanan Jamkesmas ke Pemda, yang mengakibatkan adanya hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan penderita rawat inap dan rawat jalan.
13. Kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota dengan RS terutama pelaporan dan pemanfaatan klaim.
14. Secara umum tidak ada masalah dengan pencairan dana BOK, kecuali untuk Kab. Maluku Barat Daya, karena transportasi laut/udara yang sangat sulit disbanding kab/kota lain.

IV. KESIMPULAN

1. Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Maluku dilaksanakan sesuai jadwal.
2. Seluruh permasalahan, usul, dan saran yang diperoleh di lapangan selama kunjungan kerja akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh Komisi IX DPR RI serta mitra kerja Komisi IX DPR RI.

VI. PENUTUP

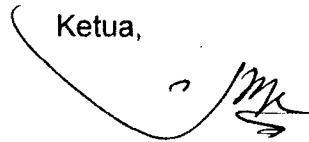
Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Maluku pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 yang dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2013. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan pelaksana program Pemerintah di daerah, khususnya di Provinsi Maluku.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik dari seluruh mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah, para kepala Dinas dan Instansi terkait, serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama kunjungan kerja Tim Komisi IX DPR, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Maret 2013

Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI

Ketua,



dr RIBKA TJIPTANING

A- 342